

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintah yang ada pada di setiap daerah (Wimpi Priambudi, 2017). Pemerintah daerah (Pemda) mempunyai hak dan wewenang untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan atas aspirasi masyarakat (Muhammad Syukri dan Hinaya, 2019). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah (Yuliana, 2014).

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah (Sukarna, 2013:19). Dengan adanya pemberian otonomi daerah memberikan pemahaman bahwa setiap daerah diharuskan sanggup memenuhi kebutuhan semua kegiatan pelayanan, pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik yang menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah. Kebijakan otonomi

daerah lahir karena melihat perkembangan kondisi di dalam negeri yang menunjukkan keinginan dari rakyat akan transparansi informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Selain itu kondisi dunia secara global pun mengindikasikan semakin kuatnya arus globalisasi yang tentunya menuntut adanya daya saing yang kuat antar tiap negara. Upaya penguatan daya saing negara secara umum dapat dicapai bila pemerintah daerahnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah. Maka dari itu tujuan program otonomi daerah sendiri adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Menurut Sukarna (2013:8) kekuasaan daerah otonomi sangat luas karena pemerintahan daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang terdiri dari bidang pendidikan, pertanian, kesejahteraan, kesehatan, perumahan, perekonomian dan lain-lain. Berbeda dengan halnya pusat hanya menangani beberapa kewenangan birokrasi luar negeri, keamanan, dan ketertiban, dan keuangan nasional, pertahanan, yustisi dan agama (Hustianto Sudarwadi, 2015).

Otonomi daerah dewasa ini telah menjadi semacam *new product* dari sebuah industri bernama pemerintah yang begitu masuk di pasar langsung memperoleh tanggapan sangat tinggi (Parassela *et al*, 2017). Dengan otonomi

daerah, pemerintah daerah lebih berhak dalam membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Peningkatan hak dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahannya. Peningkatan tanggung jawab disini diantaranya adalah upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang dijalankannya. Karena memang peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan daerah yang semakin baik.

Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Hustianto Sudarwadi, 2015). Peningkatan desentralisasi berkaitan dengan bagaimana daerah mampu dalam menggali penerimaan dan pemasukan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Hustianto Sudarwadi, 2015). Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus-menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah

daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Menurut Ida Mentayani *et al* (2012), pendapatan asli daerah (PAD) Idealnya merupakan sumber pendapatan pokok daerah, sedangkan sumber pendapatan lain dapat bervariasi dan cenderung diluar pengendalian kewenangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

Kemampuan keuangan setiap daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatannya berbeda satu sama lain, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya (Parassela *et al*, 2017). Oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah lebih mengoptimalkan pengalokasian pendapatan asli daerah (PAD) yang dididapkannya untuk membiayai belanja modal.

Menurut Desak Gede Yudi Atika Sari *et al*, (2017) hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan

setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain- lain. Dengan demikian, ada hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian, karena semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Rizanda Ratna Pradita, 2015). Sehingga dapat diasumsikan bahwa pentingnya suatu anggaran belanja untuk berbagai kepentingan publik. Beberapa tahun terakhir belanja modal mengalami peningkatan, itu terjadi karena pemerintah beranggapan bahwa pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Elni, 2016).

Fenomena lainnya yang terjadi saat ini, yaitu lebih minimnya alokasi belanja modal yang dimiliki pemerintah jika dibandingkan belanja barang dan belanja pegawai yang secara tidak langsung menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat. Jika ingin meningkatkan pembangunan sekaligus

meningkatkan pendapatan per kapita, pemerintah seharusnya memberi alokasi belanja modal lebih besar. Karena rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Pada dasarnya pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Maka dari itu, pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis digunakan untuk belanja barang dan belanja pegawai. Banyak pihak menyampaikan bahwa jumlah belanja pegawai yang dinilai terlalu besar inilah yang mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk belanja modal, yang dipandang lebih mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat. (<https://djpk.kemenkeu.go.id>)

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Rizanda Ratna Pradita, 2015). Menurut Saragih (2003:129), pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Menurut Felix (2012) peningkatan Belanja Modal yang dianggarkan mengakibatkan peningkatan Belanja Modal dalam kaitannya penambahan infrastruktur dan sarana publik. Belanja Modal dalam pemahamannya

berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah salah satu pelaku ekonomi modern pemerintah memiliki kekuatan serta kemampuan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian disamping itu juga mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh rumah tangga dan perusahaan. Menurut Elni (2016) Karena jika semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan layanan publik, seperti halnya ketika bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat begitu memuaskan dan terasa, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk meningkatkan produktivitas perekonomian yang ada di suatu daerah tertentu. Maka dari itu tentu optimalisasi belanja modal sebagai alokasi belanja daerah yang paling utama ini direalisasikan, maka dapat merubah tatanan sistem pemerintahan yang ada di daerah sehingga dapat berjalan secara profesional. Setiap Tahunnya Seperti Terlihat Pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Belanja Modal Pemerintah Banten Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2016	1.730.520.000.000,00	1.334.133.364.993,00	(396.386.635.007,00)	77,09
2017	1.515.650.000.000,00	1.349.687.360.354,00	(165.962.639.646,00)	89,05
2018	1.763.916.437.305,00	1.362.550.904.273,36	(401.365.533.031,64)	77,25
2019	51.672.878.000,00	48.371.896.677,00	(3.300.981.323,00)	93,61
2020	36.240.308.468,00	35.536.948.860,00	(703.359.608,00)	98,06

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah penulis, 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Belanja Modal di Provinsi Banten pada tahun 2016 memiliki anggaran sebesar Rp1.730.520.000.000,00

milyar dengan realisasi sekitar Rp1.334.133.364.993,00 milyar, tahun 2017 anggaran sebesar Rp1.515.650.000.000,00 milyar dengan realisasi sekitar Rp1.349.687.360.354,00 milyar, tahun 2018 anggaran sebesar Rp1.763.916.437.305,00 milyar dengan realisasi sekitar Rp1.362.550.904.273,36 milyar, tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp51.672.878.000,00 milyar dengan dengan realisasi sekitar Rp48.371.896.677,00 milyar, tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp36.240.308.468,00 milyar dengan realisasi sekitar Rp35.536.948.860,00 milyar. Terjadinya penurunan belanja modal pemerintah provinsi Banten Tahun 2016-2020 dikarenakan pengalokasian dana yang diutamakan adalah untuk penanganan Covid-19 seperti bantuan sosial untuk warga terdampak covid dan alat medis untuk tenaga medis (www.djpk.kemenkeu.go.id).

Data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disajikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Provinsi Banten adalah yang terbesar kelima di antara provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah di Indonesia. Dengan besarnya potensi daerah dan besarnya realisasi APBD Provinsi Banten diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk pembiayaan kegiatannya selain menggunakan dana perimbangan khususnya dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap (Parassela *et al*, 2017). Alokasi

belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya lebih banyak kepada belanja modal yang lebih produktif seperti melakukan aktivitas pembangunan serta program-program layanan publik daripada lebih banyak dialokasikan ke belanja rutin yang kurang produktif (Darwanto & Yustikasari, 2007).

Kalau belanja pegawai dapat diturunkan, maka APBD akan semakin sehat. Upaya ini dianggap lebih memberi dorongan pada sektor ekonomi, selain lebih bermanfaat bagi daerah ketimpangan APBD dihabiskan untuk pembayaran gaji pegawai pemda. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, Pemerintah Pusat terus menghimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar persentase belanja modal terus ditingkatkan. Penambahan persentase belanja modal itu tidak sulit karena dilaksanakan secara bertahap. Idealnya proporsi belanja modal ditingkatkan menjadi 35%, sehingga pembangunan di daerah bisa lebih terasa. Sayangnya, belum ada aturan yang memberikan *punishment* bagi yang sedikit mengalokasikan dananya untuk belanja modal, dan tidak ada bentuk penghargaan terhadap pemerintah daerah yang belanja modalnya tinggi (<https://djpk.kemenkeu.go.id>)

Sejalan dengan penelitian *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)* terbaru pada tahun 2019 Rusli Abdullah menilai penggunaan APBD hingga saat ini masih cenderung berorientasi pada penyelenggaraan

pemerintahan, bukan pembangunan yang berdampak pada perekonomian (<https://ekonomi.bisnis.com>). Tahun 2020 pemerintah provinsi Banten mengalami dampak yang cukup signifikan seperti yang disampaikan gubernur Banten Wahidin Halim untuk menjawab pertanyaan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten dalam Pemandangan Umum terhadap Nota Pengantar Gubernur Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 adalah karena kondisi pandemi Covid-19 (<https://bantenprov.go.id>).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya antara lain:

1. Ade Onny Siagian (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal” hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.
2. Rendy Armando Kakasih, George M.V. Kawung dan Steeva Y.L Tumangkeng (2018) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2016” hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

3. Made Ari Juniawan dan Ni Putu Suryantini (2018) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kota dan Kabupaten Provinsi Bali.
4. Ahmad Datail *et al.* (2020) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018.
5. Farhan Kresna Pramudya dan M Faisal Abdullah (2021) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
6. Parassela Pangestu P *et al* (2017) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal di Jambi.

7. Muhammad Fahmi dan Hairani (2019) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal sementara dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.
8. Muhammad Fahmi dan Hairani (2019) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan" hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sementara DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal Hasil uji secara simultan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
9. Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau" hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap yang signifikan terhadap belanja modal sementara DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal.
10. Siti Dini *et al* (2020) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2018" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana

alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara periode 2016-2018 sementara dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2018.

11. Yani Rizal dan Erpita (2019) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kota Langsa.
12. Engkos Kosim (2017) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.
13. Yuliana (2014) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra)" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
14. Desak Gede Yudi Atika Sari *et al* (2017) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali" hasil penelitian menunjukkan bahwa

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.

15. Wimpi Priambudi (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013” hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa.
16. Hustianto Sudarwadi (2015) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014)" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sementara dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
17. Mawarni Darwanis dan Syukriy Abdullah (2013) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Aceh)" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

18. Andri devita, Arman Delis dan Junaidi (2014) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung.
19. Susi Susanti dan Heru Fablevi (2016) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh)" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal kota/kabupaten yang ada di Aceh.
20. Venny Tria syukri Selamat Rahmadi dan Permadi (2019) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi" hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.
21. Muhammad Syukri dan Hinaya (2019) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan" hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana

alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

22. Deva Yoga Permana dan Shiddiq Nur Raharjo (2013) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)" melakukan penelitian yang berjudul menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal, dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal sementara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Rencana Penelitian Penulis**

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Ade Onny Siagian (2020) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal"	Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Metode pendekatan kuantitatif Metode sensus	Variabel Dana Transfer dan Lokasi Penelitian Alat Analisis Regresi linear berganda	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal di Provinsi D.I.	Jurnal Bisnis Terapan, Vol. 4, No. 2 2020 p-ISSN 2580-4928

Yogyakarta.					
2	Rendy Armando Kakasih, George M.V. Kawung dan Steeva Y.L Tumangkeng (2018) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2016	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Data sekunder	Lokasi Penelitian Alat Analisis Regresi linear berganda	Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal sementara Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 18, No. 2 2018
3	Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) "Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali"	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Data kuantitatif Metode Sampling Jenuh (sensus)	Variabel Dana Alokasi Khusus dan Lokasi Penelitian Alat Analisis Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di provinsi Kota dan Kabupaten yang ada di Bali.	E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281 ISSN : 2302-8912
4	Ahmad Daitail <i>et al.</i> (2020) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Metode Eksplanatori Alat Analisis Regresi Data Panel	Variabel Dana Alokasi Khusus dan Lokasi Penelitian Pengambilan Data Survey	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sementara Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap	Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial , Vol 14 No. 1 (2020). ISSN 1907-9990 E-ISSN 2548-7175

	2013-2018"			Belanja Modal Umum di provinsi Kota dan Kabupaten yang ada di Jawa Timur	
5	Farhan Kresna Pramudya dan M Faisal Abdullah (2021)"Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal"	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal	Variabel Dana Alokasi Khusus dan Lokasi Penelitian Alat Analisis Regresi Berganda	Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten di Pulau Madura	Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen Vol. 17, No. 4 (2021) : 653-660 pISSN: 0216-7786 eISSN: 2528-1097
6	Parassela Pangestu P <i>et al.</i> (2017) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal"	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal	Lokasi Penelitian	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal di Jambi	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja Vol. 4, No. 4, Oktober - Desember 2019. ISSN : 2460-6235

		Analisis Regresi Linear Berganda			
7	Erdi Adyatma (2015) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi"	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal	Variabel Dana Alokasi Khusus dan Lokasi Penelitian Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.	Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan Vol. 4, No. 2 Hlm. 90-205 Nopember 2015 ISSN : 1979-4878
8	Muhammad Fahmi dan Hairani (2019)	Variabel Pendapatan Asli Daerah,	Lokasi Penelitian Analisis	PAD berpengaruh positif	Jurnal Media Wahana Ekonomika,

	"Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan"	Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Metode Sensus	Regresi Linear Berganda	signifikan terhadap Belanja Modal sementara DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal Hasil uji secara simultan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal	Vol. 16 No. 1, April 2019 : 40-50. ISSN 1693-4091 E-ISSN 2622-1845
9	Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau"	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Modal Deskriptif Metode Sensus	Lokasi Penelitian Alat Analisis Regresi Linear Berganda	PAD tidak berpengaruh terhadap yang signifikan terhadap Belanja Modal sementara DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal	PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol 6 No. 1 Tahun 2018. P-ISSN: 2337-652x E-ISSN: 2598-3253
10	Siti Dini <i>et all</i> (2020) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2018"	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Metode Sampel Jenuh (Sensus)	Variabel Dana Alokasi Khusus dan Lokasi Penelitian Analisis Regresi berganda	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2018. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi	PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol 3 No. 1, Juni 2020

				Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. PAD, DAU dan DAK secara simultan memiliki berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	
11	Yani Rizal dan Erpita (2019) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa"	Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Metode Studi Kasus	Lokasi Penelitian Analisis Regresi Sederhana	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	Jurnal Samudra Ekonomika Vol 3 No. 1, April 2019 ISSN 2549-4104
12	Engkos Kosim (2017) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar"	Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal	Variabel Sisa Lebih Pembiayaan dan Lokasi Penelitian Analisis Regresi Berganda	PAD, DAU dan SilPA berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal	Journal of Management Review, Vol. 1 No. 1 ISSN-P: 2580-4138 ISSN-E:2579-812x
13	Yuliana (2014) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra)"	Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Metode Sensus	Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Lokasi Penelitian Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 5, No. 1, Maret 2014 Hlm 33-48. p-ISSN : 2087-2054 e-ISSN : 2722-1261
14	Desak Gede Yudi Atika Sari et all (2017) "Pengaruh Pertumbuhan	Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal	Variabel Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih	Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil,	Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi,

	Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali"	Sensus/ Sampling Jenuh	Pembiayaan dan Lokasi Penelitian Analisis Regresi Linear Berganda	Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal	Vol 9, No. 1 Juli 2017. ISSN : 2301-8879
15	Wimpi Priambudi (2017) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013"	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Metode Survey	Lokasi Penelitian Analisis Uji Regresi Linier Sederhana dan Uji Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa	Jurnal Nominal Vol. 6 No. 1
16	Hustianto Sudarwadi (2015) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014"	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Sampel Jenuh	Variabel Dana Alokasi Khusus dan Lokasi Penelitian Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal sementara Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal	Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA)-2015 ISBN 978-602-17129-5-5
17	Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah (2013) "Pengaruh Pendapatan Asli	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja	Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Lokasi Penelitian	Hasil pengujian koefisien jalur bahwa PAD dan DAU berpengaruh secara	Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala pp. 80-90. ISSN 2302-0164

	Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)"	Modal Path analisis Sampel Jenuh		simultan terhadap belanja modal sementara secara parsial PAD berpengaruh positif sementara DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal. PAD, DAU dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh	
18	Andri Devita, Arman Delis dan Junaidi (2014) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi"	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal	Variabel Jumlah Penduduk dan Lokasi Penelitian Analisis Regresi Berganda	PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan belanja langsung. Sedangkan jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja langsung	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 2 No.2, Oktober-Desember 2014 ISSN: 2338-4603
19	Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh)"	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Sensus	Variabel Dana Bagi Hasil dan Lokasi Penelitian Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di provinsi Kota dan Kabupaten yang ada di	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2016) Hlm 183-191

				Aceh	
20	Venny Tria Vanesha, Selamat Rahmadi dan Permadi (2019) "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi"	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Analisis Regresi data panel	Variabel Dana Alokasi Khusus dan Lokasi Penelitian	PAD, DAK dan DAU terhadap belanja modal. Meskipun secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara PAD dan DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal	Jurnal Paradigma Ekonomi Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2019 ISSN: 2085-1960
21	Muhammad Syukri dan Hinaya (2019) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan"	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal	Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus dan Lokasi Penelitian Terapan Regresi Berganda	secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Sementara parsial hanya PAD yang berpengaruh secara signifikan sementara pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah	Jurnal Of Economic Management and Accounting (JEMMA) Vol. 2 No. 2, September 2019 p-ISSN : 2615-1871 e-ISSN : 2615-5850

22	Deva Yoga Permana dan Shiddiq Nur Raharjo (2013) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Metode Sensus	Variabel Dana Alokasi Khusus,1 Pertumbuhan Ekonomi dan Lokasi Penelitian Analisis Regresi Berganda	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal daerah, sementara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan untuk dana alokasi khusus tidak terdapat pengaruh positif terhadap belanja modal daerah Jawa Tengah	Diponegoro Journal of Accounting, 2013, Hal. 1-10 Vol. 2, No. 4 ISSN: 2337-3807
----	---	--	--	--	---

MUHAMMAD ZULFIKAR (2022): Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal: Sensus Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Pemerintahan Provinsi Banten. Dimana Pendapatan Asli Daerah (X_1) Dana Alokasi Umum (X_2) dan Belanja Modal (Y)

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang inkonsistensi, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sebagai variabel independen dan belanja modal sebagai variabel dependen di Provinsi Banten, hal ini didasari oleh belum menemukan penelitian sejenis dengan rentang waktu selama 5 tahun menggunakan metode sensus dan menggunakan analisis regresi data panel sehingga hal ini menjadi alasan peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum**

Terhadap Belanja Modal (Sensus pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2016-2020
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2016-2020 baik secara Parsial dan Simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2016-2020 baik secara Parsial dan Simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan antara lain bagi:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan berpikir dan menganalisis permasalahan ekonomi khususnya mengenai masalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.

2. Bagi Praktisi

Dapat menjadi referensi dan menetapkan suatu strategi untuk peryimbangan dalam solusi untuk menanggulangi masalah keuangan daerah, khususnya di bidang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Banten melalui pengambilan data dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang menyajikan data valid mengenai perekonomian di Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, penulis melaksanakan penelitian pada bulan September 2021 sampai dengan bulan September 2022, sebagaimana yang telah dilampirkan pada lampiran 1